



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Ketua Baznas dan Ketua BWI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 13 September 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 2. Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2021 3. Isu – Isu Aktual
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 42 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Ketua Baznas beserta jajarannya. 4. Ketua BWI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.32 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan agenda, “**Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2021, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, serta Isu-isu Aktual Lainnya**”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendukung Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk:
 - a. Meningkatkan serapan anggaran biaya operasional BWI tahun 2021 yang sudah terealisasi sebesar Rp5.277.961.661,- (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) atau sekitar 66 persen dari total anggaran sebesar Rp8.000.000.000,- (*Delapan Miliar Rupiah*)
 - b. Meningkatkan target wakaf uang yang sampai 31 Juli 2021 sudah mencapai 77,1 Miliar dan mendorong penyelesaian 163.344 bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat.
 - c. Menambah anggaran operasional BWI Tahun 2022 menjadi sebesar Rp20.000.000.000,-
2. Komisi VIII DPR RI mendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk:
 - a. Meningkatkan serapan anggaran biaya operasional BAZNAS tahun 2021 yang sampai 10 September 2021 baru terealisasi Rp3.851.268.969,- (*Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) atau sekitar 51,7 persen dari total anggaran sebesar Rp7.450.200.000,- (*Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
 - b. Meningkatkan capaian pengumpulan ZIS dan DSKL Nasional tahun 2021 yang berdasarkan data masuk di SIMBA baru sebesar Rp3,2 Triliun dari target sebesar 15,9 Triliun dengan mendorong kinerja OPZ Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Menambah anggaran operasional BAZNAS Tahun 2022 menjadi Rp30.000.000.000,- (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*)
 - d. Mendukung BAZNAS menjadi pengguna anggaran yang mempunyai bagian anggaran tersendiri.
3. Komisi VIII DPR RI mendorong BWI dan BAZNAS untuk meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan saran dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

- a. Melakukan survey mengenai indeks literasi wakaf dan zakat untuk tahun 2021 bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.
 - b. Membangun kepercayaan publik (*public trust*) dengan meningkatkan kapasitas, profesionalitas dan kompetensi *nadzir* dan LAZ dalam pengelolaan wakaf dan zakat, infaq dan sodaqoh.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melibatkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wakaf dan zakat.
 - d. Mendorong pengelolaan wakaf dan zakat dapat memberikan manfaat secara langsung kepada *maufuq alaih* dan *asnaf* serta untuk pemberdayaan masyarakat.
 - e. Meningkatkan kerjasama dan sinergitas BWI dan BAZNAS dengan Bimas Islam Kementerian Agama RI.
 - f. Komisi VIII DPR RI akan melaksanakan rapat gabungan dengan Kementerian Dalam Negeri, MenPAN/R&B, BUMN, dan TNI/Polri.
4. Komisi VIII DPR RI akan melakukan revisi Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk optimalisasi wakaf dan zakat.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.49 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.